



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI MANADO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ARMINDO PARDEDE**
2. Jabatan : **HAKIM YUSTISIAL**
3. NHK : **89446**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **2.611.800.000**

1. Tanah Seluas 590 m2 di KEPULAUAN TALAUD, HASIL SENDIRI
Rp. 11.800.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 256 m2/70 m2 di KOTA MANADO ,
HASIL SENDIRI Rp. 2.600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **554.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2001, HASIL SENDIRI
Rp. 3.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI
Rp. 6.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI
Rp. 6.000.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI
Rp. 6.000.000
5. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI
Rp. 10.000.000
6. MOBIL, TOYOTA PICK UP Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp.
14.000.000
7. MOBIL, HONDA CR-V JEEP Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.
225.000.000
8. MOBIL, NISSAN FRONTIER Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
225.000.000
9. MOBIL, NISSAN TERANO Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp.
59.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	91.330.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	391.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.648.130.000
III. HUTANG	Rp.	396.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.252.130.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.